

ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA.

Martnisa Maria Margaretha Wowor¹, Daisy S. M. Engka², Wensy F. I. Rompas³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115. Indonesia

Email : mgrthwwor08@gmail.com

ABSTRAK

Pendapatan Daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Namun, masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fenomena *flypaper effect*, yaitu keadaan di mana belanja daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah serta mengidentifikasi adanya fenomena *flypaper effect* di Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data time series selama periode 2011–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif namun tidak signifikan, dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu, tidak ditemukan adanya *flypaper effect*, yang ditunjukkan oleh koefisien PAD yang lebih besar dibandingkan dana transfer, sehingga Belanja Daerah lebih responsif terhadap PAD dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Kata kunci: Flypaper Effect, DAU, DAK, DBH, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah.

ABSTRACT

Regional Revenue plays an important role in supporting regional development and the implementation of regional autonomy, particularly in financing public services and government activities. However, the high dependence of local governments on intergovernmental transfers from the central government indicates a low level of fiscal independence. This condition may lead to the occurrence of the flypaper effect, in which regional expenditure responds more strongly to transfer funds than to locally generated revenue. This study aims to analyze the effect of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing Fund (DBH), and Regional Original Revenue (PAD) on Regional Expenditure and to identify the presence of the flypaper effect in Minahasa Regency. This research employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis. The data used are secondary data in the form of time series covering the period 2011–2024, obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Minahasa Regency and the Directorate General of Fiscal Balance. The research findings indicate that the General Allocation Fund (DAU) and Regional Original Revenue (PAD) have a positive and significant effect on Regional Expenditure in Minahasa Regency. Meanwhile, the Special Allocation Fund (DAK) has a positive but not statistically significant effect, and the Revenue Sharing Fund (DBH) has a negative and statistically insignificant effect on Regional Expenditure. Simultaneously, all four variables significantly influence Regional Expenditure. Furthermore, no flypaper effect was found, as indicated by the PAD coefficient being greater than those of intergovernmental transfers, suggesting that Regional Expenditure is more responsive to PAD than to transfers from the central government.

Keywords: Flypaper Effect, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Regional Original Revenue, Regional Expenditure.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pemerintahan, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Kebijakan ini mengalihkan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Tujuannya adalah agar pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya fiskalnya secara mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari tantangan besar, khususnya dalam hal ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Meskipun daerah diberi kewenangan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagian

besar daerah masih mengandalkan dana transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Kabupaten Minahasa sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara memiliki dinamika fiskal yang menarik untuk diteliti. Sejak terjadinya pemekaran wilayah yang melahirkan beberapa daerah baru seperti Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara, kapasitas fiskal daerah mengalami perubahan. Pemekaran tersebut menyebabkan sebagian potensi ekonomi terdistribusi ke daerah baru, sementara kebutuhan pembiayaan pelayanan publik tetap tinggi sehingga menuntut pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan serta mengelola belanja daerah secara efektif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa tahun 2020–2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Rata-rata PAD hanya berada pada kisaran Rp94 miliar hingga Rp116 miliar per tahun, sedangkan DAU mencapai lebih dari Rp600 miliar per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah Kabupaten Minahasa masih didominasi oleh dana transfer pusat.

Tabel 1. Data Perbandingan PAD, DAU, DAK dan DBH Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Rp Miliar)	DAU (Rp Miliar)	DAK (Rp Miliar)	DBH (Rp Miliar)
2020	116,03	626,19	209,59	21,46
2021	94,14	614,93	215,47	55,62
2022	94,92	611,34	178,56	118,4
2023	107,16	650,49	207,05	54,53
2024	111,19	541,09	213,76	42,21

Sumber : Badan pusat statistik Kabupaten Minahasa, 2025

Dominasi dana transfer tersebut berpotensi menimbulkan fenomena *flypaper effect*, yaitu kondisi ketika dana transfer dari pemerintah pusat memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fenomena ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan terhadap peningkatan pendapatan yang dihasilkan sendiri.

Kondisi ini juga tercermin dalam struktur belanja daerah Kabupaten Minahasa. Data realisasi belanja daerah menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja operasional, sedangkan belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur relatif lebih kecil.

Tabel 2. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024

Tahun	Total Belanja Daerah (Rp Miliar)	Belanja Operasional (Rp Miliar)	Belanja Modal (Rp Miliar)
2020	1.250,82	828,81	128,24
2021	1.251,48	853,19	146,28
2022	1.320,28	862,8	212,88
2023	1.131,79	796,34	123,84
2024	1.304,45	938,05	109,42

Sumber : Badan pusat statistik Kabupaten Minahasa, 2025 (data diolah)

Data realisasi belanja Kabupaten Minahasa selama periode 2020–2024 memperkuat indikasi tersebut. Total belanja daerah berfluktuasi dengan rata-rata di atas Rp 1.131,79 M per tahun, di mana lebih dari 70% dialokasikan untuk belanja operasional dan hanya sebagian kecil untuk belanja modal. Pada tahun 2022, belanja modal mencapai Rp 212,88 M, namun turun tajam menjadi Rp 109,42 M pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah, terutama dari transfer pusat, belum diimbangi dengan peningkatan alokasi belanja untuk sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur, investasi publik, dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, pola pengeluaran yang dominan pada belanja rutin menggambarkan lemahnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting dilakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja daerah serta mengidentifikasi apakah terjadi fenomena *flypaper*

effect di Kabupaten Minahasa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian keuangan daerah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa?
2. Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa?
3. Bagaimanakah pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa?
4. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa?
5. Bagaimanakah pengaruh DAU, DAK, DBH, dan PAD secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa?
6. Apakah terdapat fenomena *Flypaper Effect* dalam pengaruh DAU, DAK, DBH, dan PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Publik

Keuangan Publik merupakan kajian bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dan menggunakan dana tersebut untuk membiayai pengeluaran publik dalam rangka mencapai tujuan negara. Menurut Gruber (2018) keuangan publik adalah ilmu yang mempelajari pengambilan keputusan pemerintah terkait penerimaan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan adil.

Keuangan Publik dalam hal ini adalah ilmu dan praktik pengelolaan keuangan negara yang melibatkan proses pengambilan keputusan terkait penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Prinsip pengelolaan keuangan publik sendiri menekankan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik agar dana publik dapat digunakan secara optimal dalam pembangunan pelayanan publik.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, APBD berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran.

2.3 Belanja Daerah

Undang-Undang 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam jangka waktu tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan yang cukup penting dalam mencapai stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah.

2.4 *Flypaper Effect*

Flypaper Effect atau lebih dikenal dengan “efek kertas layang”. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Okun (1975) dan kemudian dikembangkan oleh Hines dan Thaler (1995). Menurut mereka *flypaper effect* secara sederhana dapat dijelaskan sebagai fenomena di mana pemerintah daerah terlalu bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat, akan tetapi masih kurang mampu untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah tersebut layaknya lalat yang menempel pada kertas perangkap (*flypaper Effect*).

Secara teori ekonomi publik, jika pemerintah daerah bisa bertindak rasional dan efisien, maka sumber dana tidak akan memengaruhi keputusan belanja. Namun pada kenyataannya transfer dari pusat lebih mendorong peningkatan belanja daerah sehingga tidak dapat menghasilkan rasio yang seimbang dalam komponen total pendapatan daerah yang kemudian digunakan untuk pengeluaran daerah. Dimana dampak yang dihasilkan dari kondisi ini adalah ketidakseimbangan sumber pembiayaan daerah yang banyak ditanggung oleh pemerintah pusat sehingga menjadi beban jangka panjang jika tidak segera diatasi.

2.5 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah proses pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan sistem negara kesatuan republik indonesia. Definisi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah otonom.

2.6 Teori Konsumsi

Teori Konsumsi merupakan salah satu teori makro ekonomi yang menjelaskan hubungan antara pendapatan dan pengeluaran konsumsi. Menurut Keynes dalam bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment Interest and Money* (1936), tingkat konsumsi suatu individu atau lembaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan disposablenya.

Dalam konteks penelitian ini konsumsi dianalogikan sebagai belanja pemerintah daerah, sementara pendapatan disposabel dapat diasosiasikan dengan pendapatan daerah baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dari transfer pemerintah pusat seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH). Dalam hal ini untuk melihat apakah pemerintah daerah cenderung lebih responsif dalam meningkatkan belanja ketika mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan ketika mengalami peningkatan PAD.

2.7 Penelitian Terdahulu

Abrar, Masnila, dan Dwitayanti (2024) dalam penelitian yang berjudul “*Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Indonesia” penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana *flypaper effect*, DAU, DBH dan PAD mempengaruhi belanja daerah di Provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda purposive sumpling dengan sumber data sekunder yang dimana menurut penelitian ini, Koefisien yang lebih rendah dikaitkan dengan PAD daerah dibandingkan dengan DAU dan DBH. Serta *flypaper effect* berdampak pada pemerintah Provinsi di Indonesia.

Dukumalamo, Jacob, dan Hatim (2023) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh *Flypaper Effect* di Kota Tidore Kepulauan” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah serta apakah terjadi fenomena *flypaper effect* di Kota Tidore Kepulauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DBH dan DAU berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAK berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah serta diketahui dalam penelitian ini terdapat *Flypaper Effect*.

Haykal, Murhaban, dan Indrayani (2024) dalam penelitian yang berjudul “Analisis *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Flypaper effect* pada PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota di provinsi aceh tahun 2020-2021. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD, DAK dan DBH tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah sedangkan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dan terjadi *flypaper effect* pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Muhammad Yudhistira A, Setiawati, dan Zulfikar (2022) dalam penelitian yang berjudul “*Flypaper Effect On Regional Expenditure And The Imp On Regencies/Municipalities Financial Performance In Indonesia*” Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan fenomena Flypaper Effect terhadap PAD, DAU, DAK dan dana bagi hasil terhadap Belanja Daerah serta dampaknya terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan data sekunder. Hasil Penelitian yang ditemukan menunjukkan adanya *flypaper effect* yang dapat menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah dan berdampak negatif sehingga diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pemerintah daerah serta kebijakan-kebijakan yang mendukung sektor-sektor ada di daerah yang memerlukan dengan tetap menjaga pengelolaa anggaran yang rasional untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerahnya.

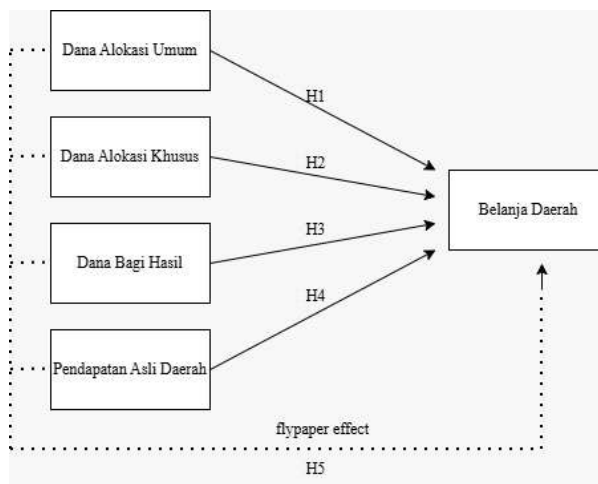
Solicha dan Hanifa (2024) dalam penelitian yang berjudul “Analisis *Flypaper Effect* Pada Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Daerah di Nusa Tenggara Timur” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Flypaper Effect* terkait pengaruh PAD, DAU dan DAK pada Belanja Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2023. Denga menggunakan pendekatan kuantitatif serta teknik

regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh serta menunjukkan bahwa tiak adanya *Flypaper Effect* di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.8 Kerangka Konseptual

Alur pemikiran ilmiah berdasarkan teori dalam penelitian ini dapat di jelaskan melalui skema berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Keterangan:

- ▶ = Pengaruh secara Parsial
- = Pengaruh secara Simultan

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder *Time Series* yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Minahasa melalui publikasi resmi seperti Kabupaten Minahasa dalam Angka dan laporan keuangan daerah. Selain itu, data pendukung juga diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan serta Dokumentasi Realisasi APBD Kabupaten Minahasa.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka.

3.3 Definisi Operasioanal dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini Belanja Daerah(Y) digunakan sebagai variabel dependen menggunakan tipe variabel yang dijelaskan atau di pengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), Dana Bagi hasil (X3), dan Pendapatan Asli Daerah (X4). Adapun definisi operasioanal variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran menurut UU 33 tahun 2004.
2. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
4. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
5. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa. Adapun bentuk fungsional dapat dilihat dibawah ini.

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + \epsilon_t$$

Keterangan :

Y_t = Belanja Daerah

X_1 = Dana Alokasi Umum

X_2 = Dana Alokasi Khusus

X_3 = Dana Bagi Hasil

X_4 = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi masing-masing variabel independen

ϵ_t = Error Term

t = Time Series

3.5 Uji Statistik

3.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian statistika yang bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya secara parsial yaitu variabel DAU, DAK, DBH, dan PAD terhadap Belanja Daerah. Metode dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dari masing-masing koefisien regresi. Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Namun, jika nilai sig \geq 0,05 maka tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

3.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian yang bertujuan untuk melihat pengaruh secara simultan semua variabel bebas terhadap variabel terikatnya yaitu Belanja Daerah. Metode ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, atau menggunakan nilai signifikansi (Sig) pada output regresi. Jika Sig < 0,05 maka semua variabel secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Namun, jika Sig \geq 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap belanja daerah.

3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen. Metode ini dilakukan dengan melihat nilai R^2 berada diantara 0-1. Maka semakin mendekati 1 semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.6 Uji Asumsi Klasik

3.6.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dari model regresi berdistribusi secara normal. Distribusi residual yang normal merupakan salah satu syarat penting dalam regresi linier klasik, agar hasil estimasi parameter bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Metode dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov yang kriteria pengujiannya melihat jika nilai Sig > 0,05 maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai Sig \leq 0,05 maka residual tidak berkontribusi normal.

3.6.2 Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji suatu persamaan apakah bebas dari masalah multikolineritas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolineritas, maka ditentukan dengan besarnya Tolerance dan VIF (Varians Inflation Factor). Semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolineritas. Nilai umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas yaitu tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah asumsi klasik regresi linier tentang kesamaan varians error terpenuhi atau tidak. Kriteria pengujian dalam metode ini adalah jika nilai Sig > 0,05 dalam uji glejser maka tidak terjadi heteroskedastisitas sebaliknya, jika nilai Sig \leq maka terjadi heteroskedastisitas. Namun jika terjadi heteroskedastisitas maka model regresi tidak memenuhi asumsi klasik dan perlu dilakukan perbaikan. Misalnya dengan transformasi data.

3.6.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksudnya, adalah nilai dari variabel dependen tidak berhubungan

dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi maka menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Jika nilai $DW < 1,5$ maka terindikasi autokorelasi yang positif sedangkan, Jika $DW > 1,5$ maka terindikasi autokorelasi negatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Hasil Estimasi Regresi

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 11/23/25 Time: 00:04
 Sample: 2011 2024
 Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-13.47428	208.0856	-0.064754	0.9500
X1	0.013091	0.004117	3.179906	0.0130
X2	0.007743	0.005743	1.348340	0.2145
X3	-0.022962	0.016292	-1.409388	0.1964
X4	0.035186	0.011800	2.981741	0.0176
R-squared	0.951001	Mean dependent var		1125.875
Adjusted R-squared	0.926502	S.D. dependent var		261.7013
S.E. of regression	70.94865	Akaike info criterion		11.64551
Sum squared resid	40269.69	Schwarz criterion		11.86280
Log likelihood	-70.69583	Hannan-Quinn criter.		11.60085
F-statistic	38.81734	Durbin-Watson stat		1.901442
Prob(F-statistic)	0.000028			

Sumber: Hasil olahan Eviews 12

Berdasarkan tabel 3 hasil analisis Ordinary Least Squares (OLS), diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y_t = -13.47428 + 0.013091X_{1t} + 0.007743X_{2t} + -0.022962X_{3t} + 0.035186X_{4t} + \epsilon_t$$

Pengaruh dari variable bebas tersebut terhadap Y berdasarkan estimasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil estimasi di atas bahwa nilai variabel Dana Alokasi Umum (DAU/X1) memiliki koefisien positif sebesar 0.013091 dan signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0130 terhadap Belanja Daerah. Pengaruh signifikan ini ditunjuk oleh nilai t-statistic 3.179906 yang lebih besar dari t-tabel 1.833. Dengan demikian, hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan positif antara DAU dan Belanja Daerah.
2. Berdasarkan hasil estimasi di atas, variabel Dana Alokasi Khusus (DAK/X2) memiliki koefisien positif sebesar 0.007743 namun tidak signifikan karena nilai probabilitas sebesar 0.2145 terhadap Belanja Daerah. Pengaruh tidak signifikan ini ditunjukkan oleh nilai t-statistic 1.348340 yang lebih kecil dibandingkan t-tabel 1.833. Dengan demikian, hasil ini tidak mendukung hipotesis yang menyatakan adanya hubungan positif antara DAK dan Belanja Daerah.
3. Berdasarkan hasil estimasi pada gambar di atas, variabel Dana Bagi Hasil (DBH/X3) memiliki koefisien negatif sebesar -0.022962 dan tidak signifikan karena nilai probabilitas sebesar 0.1964 terhadap Belanja Daerah. Pengaruh tidak signifikan ini dtunjukkan oleh nilai t-statistic -1.409388 yang lebih rendah dari t-tabel 1.833. Dengan demikian, hasil ini tidak mendukung hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif antara DBH dan Belanja Daerah.
4. Berdasarkan hasil estimasi pada gambar di atas, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD/X4) menunjukkan koefisien positif sebesar 0.035186, dan signifikan karena nilai probabilitas sebesar 0.0176 terhadap Belanja Daerah. Pengaruh signifikan ini ditunjukkan oleh nilai t-statistic 2.981741 yang lebih besar dibandingkan t-tabel 1.833. Dengan demikian, hasil ini mendukung hipotesis yang menyatakan adanya hubungan positif antara PAD dan Belanja Daerah.

4.1.2 Uji Statistik

Pengujian statistik digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terhadap dugaan atau pernyataan yang diajukan mengenai suatu populasi yang dimana melalui pengujian hipotesis peneliti

menganalisis data yang diperoleh untuk menilai apakah hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dapat diterima atau ditolak.

4.1.2.1 Uji Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah secara parsial yang merujuk pada nilai probabilitas yang di hasilkan dari proses pengolahan data melalui software Eviews 12.

- Jika nilai prob $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima
- Jika nilai prob $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Hasil perhitungan uji parsial dalam penelitian ini dapat di interpretasikan sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Analisis Uji Parsial

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	prob	Kesimpulan
X1	0.013091	0.004117	3.179906	0.0130	Signifikan
X2	0.007743	0.005743	1.348340	0.2145	Tidak Signifikan
X3	-0.022962	0.005743	-1.409388	0.1964	Tidak Signifikan
X4	0.035186	0.004117	2.981741	0.0176	Signifikan

Sumber: Hasil olahan Eviews 12

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Eviews 12, nilai t pada kolom *t-Statistic* dihitung dengan derajat kebebasan (df) sebesar $n - k = 14 - 5 = 9$. Dengan mengacu pada t-tabel untuk $df = 11$, diperoleh nilai t-tabel sebesar **1.833**. Menggunakan acuan tersebut pengaruh DAU, DAK, DBH, dan terhadap Belanja Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil regresi tabel 4 diatas, variabel DAU memiliki koefisien positif sebesar 0.013091 dan signifikan dengan probabilitas 0.0130. Nilai t-statistic sebesar 3.179906 melebihi t-tabel 1.833, sehingga DAU dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa peningkatan DAU berkaitan dengan meningkatnya Belanja Daerah.
2. Variabel DAK memperlihatkan koefisien positif sebesar 0.007743, namun tidak signifikan karena probabilitasnya 0.2145. Nilai t-statistic sebesar 1.348340 lebih kecil dari t-tabel 1.833, sehingga DAK tidak terbukti memberikan pengaruh nyata terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang mengharapkan adanya pengaruh positif dari DAK terhadap Belanja Daerah.
3. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel DBH memiliki koefisien negatif sebesar -0.022962 tidak signifikan dengan nilai probabilitas 0.1964. Nilai t-statistic sebesar -1.409388 tidak melampaui t-tabel 1.833, sehingga DBH dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Temuan ini mendukung hipotesis yang mengasumsikan adanya pengaruh DBH terhadap Belanja Daerah.
4. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki koefisien positif sebesar 0.035186 dan signifikan dengan nilai probabilitas 0.0176. Nilai t-statistic sebesar 2.981741 lebih besar daripada t-tabel 1.833, sehingga PAD terbukti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Temuan ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa PAD berhubungan positif dan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

4.1.2.2 Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan data pada Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Belanja Daerah. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai F-Statistic sebesar 38.81734, yang jauh melebihi nilai F-tabel sebesar 3.41 pada tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai Prob(F-statistic) sebesar 0.000028, yang lebih kecil dari 0.05.

4.1.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 3, nilai koefisien determinasi (R-Squared) diperoleh sebesar 0.951001. Hal ini menunjukkan bahwa 95,10% variasi perubahan pada variabel Belanja Daerah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

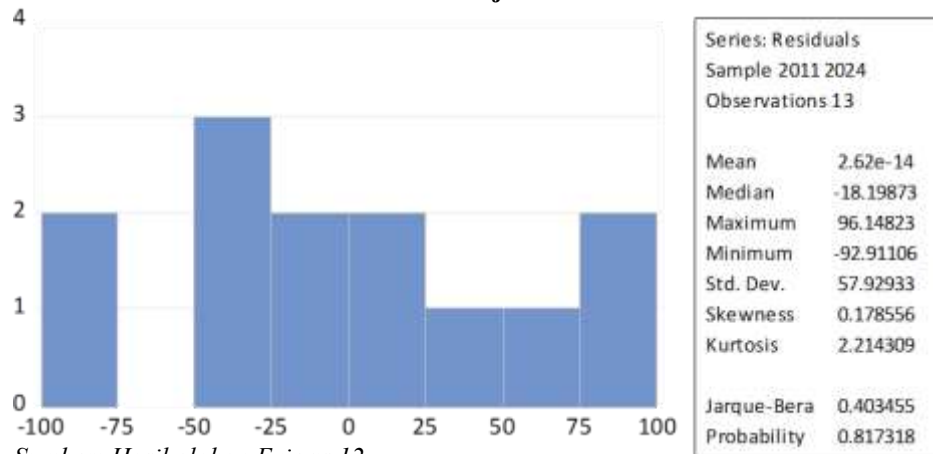
Sementara itu 4,90% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan regresi (jumlah penduduk, inflasi, dll).

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data dalam model regresi khususnya residual memiliki distribusi yang mendekati normal sehingga pemenuhan asumsi ini penting agar hasil estimasi regres dapat dipercaya. Dalam Penelitian ini Uji Normalitas dilakukan menggunakan statistik Jarque-Bera untuk menilai apakah residual berdistribusi normal atau tidak.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil olahan Eviews 12

Berdasarkan hasil pada gambar 2 disimpulkan bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0.403455, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian berdasarkan kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini disimpulkan bahwa residual dalam model ini berdistribusi normal.

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Jika multikolinearitas terjadi maka hasil estimasi koefisien menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, pengujian dilakukan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF), dimana nilai VIF yang rendah menandakan bahwa model regresi bebas dari masalah korelasi antar variabel bebas. Untuk memastikan kondisi tersebut dalam penelitian ini hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Table 5 . Hasil Uji Multikolineralitas

Variance Inflation Factors			
Date: 11/23/25 Time: 00:51			
Sample: 2011 2024			
Included observations: 13			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	43299.62	111.8260	NA
X1	1.69E-05	160.5492	2.474410
X2	3.30E-05	29.99128	4.522142
X3	0.000265	7.187231	1.099399
X4	0.000139	27.78425	3.849488

Sumber: Hasil olahan Eviews 12

Berdasarkan hasil pada tabel 5 diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolineritas yang terkait variabel bebas. Hal ini terlihat dari nilai *Centered* VIF dari keempat variabel berada di bawah angka 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil regresi tidak dipengaruhi oleh masalah multikolineritas.

4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas mengacu pada kondisi dimana penyimpangan data dari model regresi tidak konsisten. Jika terjadi heteroskedastisitas, maka uji statistic yang kita gunakan untuk menguji sign ifikan parameter model dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa model regresi kita memenuhi asumsi homokedastisitas. Berikut ini merupakan kriteria yang diterapkan dalam uji Glesjer adalah sebai berikut.

- a. Jika nilai Probabilitas Chi- Square kurang dari 0.05, maka disimpulkan bahwa terindikasi adanya masalah heteroskedastisitas

- b. Jika nilai Probabilitas Chi-Square lebih dari 0.05 , maka disimpulkan bahwa tidak terindikasi adanya masalah heterokedastisitas.

tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	2.927674	Prob. F(4,8)	0.0916
Obs*R-squared	7.723677	Prob. Chi-Square(4)	0.1022
Scaled explained SS	1.775892	Prob. Chi-Square(4)	0.7769

Sumber: Hasil olahan Eviews 12

Berdasarkan Uji Heteroskedastisitas yang tercantum dalam tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square lebih besar daripada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.1022 > 0.05$). Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut.

4.1.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi saling berhubungan dari satu periode ke periode berikutnya. Jika autokorelasi muncul, maka kesalahan pada suatu observasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kesalahan pada observasi sebelumnya.

Table 7 . Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	1.545370	Prob. F(2,6)	0.2875
Obs*R-squared	4.419841	Prob. Chi-Square(2)	0.1097

Sumber: Hasil olahan Eviews 12

Pada tabel 7 disajikan data hasil pengujian autokorelasi, dimana menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square lebih besar daripada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.1022 > 0.05$). Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa dengan koefisien sebesar 0,013091. Koefisien positif yang dihasilkan mengindikasikan bahwa peningkatan DAU cenderung diikuti oleh peningkatan pengeluaran daerah dengan asumsi faktor lain tetap. Temuan ini memperlihatkan bahwa DAU masih menjadi sumber pendanaan yang penting dalam mendukung aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Secara teori keuangan daerah DAU berfungsi sebagai dana perimbangan yang bertujuan mengurangi ketimpangan kemampuan fiskal daerah. Karakter DAU yang bersifat tidak terikat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas belanja sesuai kebutuhan lokal.

Hasil ini juga sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa DAU memiliki hubungan positif dengan Belanja Daerah seperti penelitian Maimunah (2006) dan Darwanto dan Yustika (2007), di mana dana transfer umum dari pusat berkontribusi meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Kondisi di Kabupaten Minahasa selama periode penelitian juga mencerminkan pola serupa, di mana kenaikan DAU umumnya diikuti oleh peningkatan belanja pemerintah terutama pada sektor-sektor pelayanan dasar dan kebutuhan operasional pemerintah.

4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa

Berdasarkan hasil analisis regresi Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,007743 yang mengindikasikan bahwa peningkatan DAK cenderung diikuti oleh peningkatan Belanja Daerah khususnya pada sektor-sektor tertentu yang menjadi prioritas pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan teori perimbangan keuangan pusat dan daerah serta didukung oleh penelitian sebelumnya seperti Nurhayati (2018) dan Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah terutama pada belanja pembangunan dan pelayanan publik.

4.2.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki koefisien negatif sebesar -0.022962. Hal ini menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa yang artinya peningkatan DBH tidak diikuti oleh peningkatan Belanja Daerah dengan asumsi variable lain tetap.

Secara teoritis, Dana Bagi Hasil merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari penerimaan pajak dan sumber daya alam. Namun sifat DBH yang fluktuatif dan bergantung pada kondisi ekonomi makro menyebabkan dana ini kurang stabil sebagai sumber pembiayaan Belanja

Daerah. Dalam konteks Kabupaten Minahasa, DBH yang diterima relative kecil dan tidak konsisten dari tahun ke tahun sehingga tidak dijadikan dasar utama dalam perencanaan Belanja Daerah. Pemerintah Daerah lebih mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat lebih stabil.

Temuan ini sejalan dengan beberapa temuan terdahulu, seperti penelitian oleh Sari (2019) dan Langi (2021), yang menunjukkan bahwa DBH sering kali tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan belanja daerah, terutama di daerah yang struktur pendapatannya tidak bergantung pada sektor-sektor penghasil DBH. Selain itu, ketidakstabilan DBH dapat menyebabkan pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menggunakan dana ini, sehingga tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan belanja.

4.2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien positif sebesar 0,035186 dan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan PAD akan diikuti oleh peningkatan Belanja Daerah dengan asumsi variabel lain tetap konstan dimana semakin tinggi PAD semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Secara Ekonomi PAD merupakan sumber pendapatan yang memberikan keleluasaan fiskal bagi pemerintah daerah karena dapat digunakan secara lebih fleksibel dibandingkan dana transfer. Peningkatan PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah mencerminkan meningkatkannya aktivitas ekonomi masyarakat yang kemudian mendorong peningkatan belanja sektor publik.

Temuan ini sejalan dengan teori keuangan publik yang menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari kemampuan fiskal internal memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku belanja pemerintah daerah. Daerah dengan PAD yang kuat cenderung memiliki ruang fiskal lebih luas untuk memperbesar belanja pembangunan dan layanan publik. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Maimunah (2006) dan Sularso & Restianto (2011) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah karena merupakan indikator utama kemandirian fiskal daerah.

4.2.5 Flypaper Effect di Kabupaten Minahasa

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, fenomena *Flypaper Effect* tidak terjadi di Kabupaten Minahasa selama periode penelitian. Hal ini terlihat dari koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar dibandingkan dana transfer yaitu sebesar 0,035186 sementara koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,013091, Dana Alokasi Khusus (DAK) 0,007743, dan Dana Bagi Hasil (DBH) -0,022962.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa lebih responsif terhadap peningkatan PAD dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, kriteria terjadinya *Flypaper Effect* yaitu ketika Belanja Daerah lebih dipengaruhi dana transfer daripada PAD tidak terpenuhi.

Secara ekonomi, temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Minahasa tidak terlalu bergantung pada dana transfer dalam menentukan kebijakan belanja. Sebaliknya PAD menjadi dasar utama dalam perencanaan anggaran yang mencerminkan Tingkat kemandirian fiskal yang relatif baik. Hasil ini sejalan dengan teori keuangan daerah serta penelitian yg dilakukan oleh Solicha dan Hanifa (2024) yang menyatakan bahwa tidak terjadinya *Flypaper Effect* dapat menunjukkan pengelolaan fiskal daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa. Pengaruh positif tersebut terjadi karena DAU bersifat tidak terikat sehingga pemerintah daerah lebih leluasa menggunakannya untuk membiayai kebutuhan operasional untuk memperkuat kemampuan fisik daerah sehingga mendorong peningkatan belanja. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa perubahan DAU mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap perubahan Belanja Daerah.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa, tetapi tidak signifikan secara statistik. Kondisi ini terjadi karena DAK sendiri merupakan dana yang bersifat terikat yang dimana penggunaannya telah ditentukan oleh

- pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang cukup terbatas dalam pengalokasian DAK yang secara tidak langsung hal tersebut memengaruhi belanja daerah.
3. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh negatif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa, dan pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi penerimaan DBH yang sangat bergantung pada kinerja penerimaan pusat dan potensi sumber daya alam atau pajak daerah sehingga jumlah DBH yang diterima tidak selalu stabil untuk mendorong peningkatan belanja daerah.
 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa semakin besar PAD yang diperoleh daerah maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerahnya secara mandiri.
 5. Secara simultan, PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa. Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut secara bersama-sama memiliki peran dalam menjelaskan variasi Belanja Daerah selama periode penelitian.
 6. Tidak terdapat *Flypaper Effect* di Kabupaten Minahasa, karena seluruh koefisien dana transfer (DAU, DAK, dan DBH) lebih kecil dibandingkan koefisien PAD. Dengan demikian, Belanja Daerah lebih responsif terhadap PAD dibandingkan terhadap dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Masnila, dan Dwitayanti (2024). *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Indonesia
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa. (2011–2024). *Kabupaten Minahasa dalam Angka*. Minahasa: BPS.
- Darwanto, & Yustika, A. E. (2007). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Publik*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Dukumalampo, Jacob, & Hatim, F. (2023). Pengaruh flypaper effect di Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Penelitian Sosial*, 3(6).
- Gruber, J. (2018). *Public Finance and Public Policy*. New York: Worth Publishers.
- Haykal, Murhaban, & Indrayani. (2024). Analisis flypaper effect pada Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020–2021. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 3(1).
- Hines, J. R., & Thaler, R. H. (1995). The flypaper effect. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 217–226.
- Langi (2021) Analisis Hubungan PAD dan Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara
- Maimunah, M. (2006). Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Nurhayati (2018) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia
- PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan belanja daerah

Sari (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia.

Solicha, & Hanifa. (2024). Analisis flypaper effect pada pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Independent*, 12(2), 45–58.

Sularso, H., & Restianto, Y. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wulandari (2020) Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia.